

Perencanaan Ruang dan Ketimpangan Akses Pendidikan: Studi tentang Absennya Sekolah di Kawasan Urban Fringe

Djufri

Universitas Muhammadiyah Berau
E-mail: djufri@umberau.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-06-10

Revised : 2025-07-08

Accepted: 2025-07-08

KEYWORD

*Urban Fringe, Spatial
Production, Spatial Justice,
Access to Education*

KATA KUNCI

Urban Fringe, Produksi Ruang,
Keadilan Spasial, Akses
Pendidikan

ABSTRACT

Urban fringe areas often become areas of urban expansion characterized by unequal access to public facilities, one of which is education. This research aims to understand the dynamics of space production in spatial planning in Makassar that contribute to the absence of schools in urban fringe areas. Using a critical ethnographic approach, this research combines semi-structured interviews, participatory observation, and spatial document analysis. Results show that the dominance of economic interests and investment logic in spatial planning leads to the marginalization of basic social needs such as education. Residents reacted through resistance strategies such as informal classes and community solidarity, but still faced structural limitations. This research recommends the need for spatial planning that is responsive, inclusive and oriented towards social justice.

ABSTRAK

Wilayah urban fringe kerap menjadi area ekspansi perkotaan yang diwarnai oleh ketimpangan akses terhadap fasilitas publik, salah satunya adalah pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika produksi ruang dalam perencanaan tata ruang di Makassar yang berkontribusi terhadap absennya sekolah di wilayah urban fringe. Dengan menggunakan pendekatan etnografi kritis, penelitian ini menggabungkan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen tata ruang. Hasil menunjukkan bahwa dominasi kepentingan ekonomi dan logika investasi dalam perencanaan ruang menyebabkan terpinggirkannya kebutuhan sosial dasar seperti pendidikan. Warga bereaksi melalui strategi resistensi seperti kelas informal dan solidaritas komunitas, namun tetap menghadapi keterbatasan struktural. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan ruang yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat wilayah pinggiran kota, yang dikenal sebagai urban fringe, membawa dinamika ruang yang kompleks dan penuh ketegangan. Wilayah ini tidak hanya menjadi area ekspansi fisik kota, tetapi juga menjadi medan pertarungan antara berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik yang menentukan siapa yang berhak menikmati ruang dan fasilitas publik (Cozza, 2023; Gallent et al., 2004). Salah satu isu mendasar yang sering terabaikan dalam perencanaan ruang di urban fringe adalah absennya fasilitas pendidikan,

terutama sekolah dasar, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga (Al-Sabbagh, 2022; Huang et al., 2022). Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan ketimpangan distribusi fasilitas publik, tetapi juga mengungkapkan bagaimana produksi ruang di kota-kota seperti Makassar kerap mengabaikan kebutuhan sosial yang vital demi logika ekonomi dan birokrasi (Libório et al., 2024; Wu & Liu, 2022).

Henri Lefebvre dalam teorinya tentang The Production of Space menjelaskan bahwa ruang bukanlah entitas netral yang sekadar fisik,

melainkan merupakan produk dari relasi kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial (Batuman, 2019; Rutanen, 2017). Di urban fringe Makassar, ruang yang diproduksi sering kali merupakan ruang abstrak yang dikendalikan oleh kepentingan pemerintah dan pengembang properti (Surya, 2015). Hal ini menghasilkan ruang yang indah secara fisik, namun cacat secara sosial perumahan tumbuh pesat tanpa diimbangi dengan fasilitas pendidikan yang memadai (Ramond & Oberti, 2022). Sebagaimana dikisahkan oleh Ibu Rahmi, seorang warga yang sudah menetap selama delapan tahun, “Anak saya harus menempuh perjalanan hingga 7 kilometer naik motor untuk ke sekolah, padahal waktu kami pindah dijanjikan akan ada sekolah dekat sini.” Ucapan ini mencerminkan ketimpangan yang terjadi: ruang hunian telah hadir, tetapi fungsi sosial ruang seperti pendidikan justru hilang dari peta kebutuhan warga (Shakeri & Arjmand, 2019).

Kondisi ini juga merupakan manifestasi dari dinamika pusat-pinggiran dalam proses urbanisasi (Kalfas et al., 2024). Ketika harga lahan di pusat kota Makassar terus meningkat, masyarakat berpendapatan rendah terdorong untuk tinggal di wilayah pinggiran yang kerap kali kurang diperhatikan dalam hal penyediaan fasilitas sosial (Andini et al., 2023). Lefebvre menyebut ini sebagai ruang abstrak yang diproduksi berdasarkan logika ekonomi dan geometris, bukan berdasarkan kebutuhan sosial riil (Koch, 2018). Sekolah, sebagai institusi pembentuk habitus dan modal sosial (Bourdieu), menjadi korban pengabaian karena tidak dianggap memberikan keuntungan ekonomi langsung bagi pengembang atau pemerintah daerah (Barrett & Martina, 2012).

Lebih jauh, proses perencanaan ruang di urban fringe menunjukkan dominasi kekuasaan yang tersusun rapi antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan pengembang properti sebagai pelaku ekonomi utama. Pemerintah daerah melalui dokumen seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memegang kendali formal, namun sering kali lebih memprioritaskan target pembangunan ekonomi dan investasi daripada kebutuhan sosial warga (Burhanuddin et al., 2024; Mulya et al., 2022). Pak Jaya, pegawai dinas tata ruang, mengakui, “Kami mengikuti target pusat dan kebutuhan investasi. Fasilitas sosial seperti sekolah sulit diakomodasi karena anggaran dan prioritas yang terbatas.” Di sisi lain, pengembang properti mengutamakan pembangunan rumah dan akses jalan yang cepat terjual, sementara fasilitas pendidikan diserahkan kepada pemerintah tanpa kepastian realisasi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu

Dina, pengembang lokal, yang mengatakan, “Fasilitas seperti sekolah penting, tapi pembeli dan investor fokus pada rumah dan jalan dulu.” Kondisi ini membuat sekolah berada pada posisi marginal dalam proses produksi ruang di urban fringe (Banu & Fazal, 2016).

Masyarakat lokal sebagai pengguna ruang yang utama seringkali terpinggirkan dalam proses perencanaan. Mereka menggunakan strategi infrapolitik (James C. Scott) berupa perlawanan tersembunyi dan adaptasi informal untuk mengisi kekosongan yang ada, seperti membuka kelas belajar di rumah atau balai desa (Marshall et al., 2014; Zanudin et al., 2019). Pak Arif, mantan guru dan relawan pendidikan, menyatakan, “Kami buat kelas sore di balai RT, tapi itu tidak bisa menggantikan sekolah formal.” Praktik ini menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha bertahan meski menghadapi ketidakadilan dalam produksi ruang yang tidak inklusif.

Perbedaan akses pendidikan antara pusat kota dan urban fringe semakin menguatkan ketimpangan sosial. Di pusat kota Makassar, fasilitas pendidikan tersedia lebih lengkap dan mudah diakses, sementara di pinggiran kota fasilitas tersebut sangat terbatas (Mateo-Doll & Aghezzaf, 2025). Hal ini menimbulkan hambatan fisik dan sosial bagi anak-anak pinggiran untuk mengakses pendidikan berkualitas. Pak Budi, warga urban fringe, menyampaikan, “Sekolah di pusat kota dekat dan lengkap, tapi anak saya harus berangkat pagi-pagi dan perjalanan jauh ke sekolah.” Ketimpangan ini diperparah oleh perbedaan modal sosial yang dimiliki keluarga, di mana keluarga yang lebih mampu dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya untuk akses pendidikan, sedangkan keluarga miskin terjebak dalam keterbatasan (Ashtiani & Feliciano, 2018; Ni & Gao, 2025).

Dokumen perencanaan tata ruang seringkali menggambarkan ruang pendidikan secara formal dan normatif, namun realisasi di lapangan jauh dari ideal. Sekolah di peta perencanaan ada, tetapi pembangunan dan pengelolaannya terhambat oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya komitmen (Norton, 2005). Pak Rahmat, perencana kota, menyatakan, “Sekolah sudah dialokasikan sesuai standar, tapi pengawasan dan realisasi di lapangan yang sering bermasalah.” Ini memperlihatkan jarak antara ruang terencana yang bersifat abstrak dengan ruang yang dialami masyarakat sehari-hari.

Absennya sekolah dalam kehidupan warga urban fringe tidak hanya berdampak pada akses pendidikan, tetapi juga menimbulkan rasa keterasingan, ketidakadilan, dan marginalisasi

sosial (Dräger et al., 2024; Miller et al., 2008). Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh yang berisiko, dan keluarga terpaksa mencari alternatif pendidikan informal yang jauh dari ideal. Pak Hadi, seorang ayah, menyebutkan, “Kami merasa seperti warga kelas dua, hak anak kami tidak sama dengan anak-anak di kota.” Ketidaksetaraan ini menciptakan lingkaran ketidakberdayaan yang sulit diputuskan tanpa intervensi kebijakan yang serius (Prahmana et al., 2021; Sari et al., 2024).

Resistensi warga terhadap ketiadaan fasilitas pendidikan muncul dalam bentuk pembentukan ruang belajar alternatif secara mandiri, advokasi informal, dan solidaritas komunitas. Bu Wati, relawan pendidikan, menyampaikan, “Kami mengadakan kelas belajar di rumah karena sekolah jauh dan sulit dijangkau.” Strategi ini adalah manifestasi dari kekuatan modal sosial dan solidaritas, namun tetap saja bukan solusi yang cukup untuk mengatasi ketimpangan sistemik (Baldrige et al., 2017; Dolan, 2020).

Ruang informal ini menjadi respons nyata atas kekosongan infrastruktur pendidikan, sekaligus wujud ketahanan sosial warga di tengah ketidakadilan spasial. Namun, ruang belajar informal ini tidak memiliki legitimasi dan sumber daya yang memadai, sehingga kualitas dan kesinambungannya tetap menjadi persoalan (Salih et al., 2024; Yau et al., 2023). Pak Joko, guru sukarelawan, menegaskan, “Tanpa dukungan resmi, hasilnya tidak maksimal dan ini bukan solusi jangka panjang.”

Modal sosial berperan krusial dalam membuka akses pendidikan di urban fringe. Jaringan hubungan sosial, solidaritas, dan gotong-royong antarwarga menjadi modal penting untuk mengatasi keterbatasan fasilitas formal (Fuller, 2014; Kilpatrick et al., 2010). Bu Ani, ibu rumah tangga, mengatakan, “Kami saling membantu mengajar dan berbagi informasi tentang beasiswa dan sekolah.” Namun, modal sosial ini juga memperlihatkan ketimpangan, karena tidak semua keluarga memiliki jaringan yang kuat untuk mengakses peluang tersebut.

Tokoh masyarakat dan pemimpin lokal memainkan peran ambivalen dalam isu pendidikan. Mereka bisa menjadi advokat penting yang menyuarakan kebutuhan warga, atau sebaliknya menjadi alat pembungkam yang menjaga status quo demi kepentingan politik atau patronase. Pak Hasan, kepala lingkungan, menyatakan, “Kami terus berjuang, tapi hasilnya lambat.” Sementara beberapa warga mengaku diminta diam agar tidak

mengganggu hubungan dengan pemerintah (Deggs & Miller, 2013; Newman et al., 2012).

Secara simbolik, absennya pendidikan merupakan kekerasan simbolik yang mengukuhkan posisi subordinat warga urban fringe dalam hierarki sosial dan politik. Narasi pembangunan yang hanya fokus pada aspek ekonomi dan fisik mengabaikan hak dasar pendidikan, menimbulkan eksklusi simbolik bagi warga miskin yang merasa tidak layak mendapat pendidikan berkualitas (Croizet et al., 2017; Ergin et al., 2019).

Proses pewarisan habitus pendidikan dalam keluarga tetap terjadi di tengah absennya sekolah formal, dengan keluarga berperan sebagai agen pendidikan utama melalui pengajaran informal dan penanaman nilai. Namun, keterbatasan sumber daya dan lingkungan yang tidak kondusif menjadi tantangan besar bagi pembentukan habitus tersebut (Kuru Cetin & Taskin, 2016; Niklas et al., 2016).

Warga urban fringe menyadari hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, tetapi kapasitas untuk menuntut keadilan sering terbatas oleh modal sosial dan hambatan struktural. Strategi infrapolitik seperti advokasi kecil-kecilan dan pembelajaran komunitas menjadi jalan bertahan yang utama (Danley & Rubin, 2020; Morgan, 2022).

Distribusi infrastruktur pendidikan di Makassar mencerminkan ketidakadilan spasial yang nyata, di mana urban fringe menerima fasilitas pendidikan yang jauh lebih terbatas dibandingkan pusat kota. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan perencanaan ruang yang lebih inklusif dan responsif, yang mengintegrasikan kebutuhan sosial warga dan mengedepankan keadilan dalam pembangunan fasilitas publik (Akil et al., 2020; MacDonald et al., 2024).

2. Tinjauan Literatur

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam dinamika perencanaan tata ruang dan absennya fasilitas pendidikan di wilayah urban fringe Kota Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis, yang memungkinkan peneliti memahami proses sosial, relasi kekuasaan, dan makna yang terbentuk dalam praktik produksi ruang dan pendidikan di lapisan masyarakat yang termarginalkan. Pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi narasi warga secara kontekstual dan holistik, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di wilayah urban fringe Kota Makassar, area yang mengalami perkembangan pesat namun

menunjukkan ketimpangan nyata dalam penyediaan fasilitas pendidikan dasar. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta relevansi dengan fokus penelitian terhadap produksi ruang dan akses pendidikan di pinggiran kota.

Objek penelitian meliputi berbagai aktor dan fenomena yang terkait dengan produksi ruang pendidikan di urban fringe, yaitu pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan tata ruang, pengembang properti, masyarakat lokal sebagai pengguna ruang, serta lembaga non-pemerintah yang berperan dalam pendidikan alternatif. Objek juga mencakup dokumen perencanaan tata ruang serta praktik informal warga dalam mengatasi absennya sekolah.

Epistemologi penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivis sosial, yang memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, persepsi, dan praktik sosial. Paradigma ini sesuai dengan tujuan memahami bagaimana ruang dan pendidikan dimaknai dan diproduksi oleh berbagai aktor dalam konteks kekuasaan dan ketidaksetaraan spasial di urban fringe. Penelitian ini menempatkan subjek sebagai agen aktif yang membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan ruang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur menjadi metode utama untuk menggali perspektif, pengalaman, dan narasi aktor-aktor kunci seperti pejabat dinas tata ruang, pengembang, tokoh masyarakat, serta warga lokal. Wawancara ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi isu secara mendalam sambil tetap menjaga fokus pada topik penelitian. Contoh pertanyaan diarahkan pada proses pengambilan keputusan perencanaan, pengalaman warga terkait akses pendidikan, dan strategi adaptasi terhadap ketimpangan ruang.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk merekam praktik-praktik sosial dan kondisi lapangan secara langsung, seperti bagaimana warga mengorganisasi pendidikan informal, interaksi antarwarga dalam komunitas, dan realisasi fisik tata ruang di lapangan. Observasi ini memperkaya data dengan konteks empiris yang autentik dan mendukung verifikasi temuan dari wawancara dan dokumen.

Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen perencanaan tata ruang resmi seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kebijakan pembangunan daerah, dan peta zonasi yang menggambarkan alokasi ruang pendidikan. Analisis dokumen ini berfungsi untuk memahami

representasi formal ruang pendidikan dalam perencanaan serta gap antara dokumen dan praktik nyata di lapangan.

Analisis data mengikuti prosedur koding tematik dengan pendekatan induktif dan deduktif. Data wawancara, hasil observasi, dan dokumen dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan produksi ruang, distribusi fasilitas pendidikan, dan strategi warga dalam mengatasi absennya sekolah. Proses analisis menekankan triangulasi data untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan. Narasi hasil analisis dibangun secara sistematis dengan mengintegrasikan teori-teori sosial yang relevan untuk mendukung interpretasi.

Sebagai kerangka teoretis pendukung, penelitian ini menggunakan teori produksi ruang dari Henri Lefebvre untuk memahami bagaimana ruang dihasilkan oleh relasi kekuasaan dan ideologi dalam konteks perencanaan kota. Selain itu, teori modal sosial dan kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu digunakan untuk mengkaji bagaimana akses pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial dan simbolik dalam masyarakat. Konsep keadilan spasial dari David Harvey menjadi landasan analisis ketimpangan distribusi fasilitas publik. Pendekatan infrapolitik James C. Scott membantu menginterpretasi bentuk-bentuk resistensi dan adaptasi warga terhadap dominasi ruang yang tidak adil.

Tujuan metodologis penelitian ini adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai produksi ruang pendidikan di urban fringe serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan pendidikan. Metode yang dipilih bertujuan untuk menangkap kompleksitas hubungan antara kebijakan, praktik pembangunan, dan pengalaman warga, sekaligus memberikan basis empiris yang kuat bagi rekomendasi kebijakan yang inklusif dan responsif. Dengan desain ini, penelitian mampu mengintegrasikan perspektif multi-aktor dan menyajikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3. Metode

Penelitian ini mengkaji fenomena absennya fasilitas pendidikan, khususnya sekolah dasar, dalam konteks produksi ruang di wilayah urban fringe Kota Makassar. Berdasarkan teori produksi ruang Henri Lefebvre, modal sosial dan kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, keadilan spasial David Harvey, serta konsep infrapolitik James C. Scott, penelitian menemukan berbagai aspek krusial yang

menggambarkan ketimpangan dan resistensi sosial di wilayah tersebut.

1) Produksi Ruang Urban Fringe dan Marginalisasi Pendidikan

Ruang di urban fringe Kota Makassar diproduksi bukan hanya oleh kebijakan dan tata ruang formal, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang dominan. Lefebvre menegaskan bahwa ruang adalah hasil relasi kekuasaan, bukan semata fisik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di wilayah ini berlangsung pesat, namun fasilitas pendidikan yang merupakan kebutuhan sosial dasar seringkali tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Wawancara dengan Ibu Rahmi mengungkapkan bahwa meskipun janji akan dibangun sekolah sudah disampaikan saat pindah ke kawasan tersebut, kenyataannya sekolah tersebut belum terealisasi sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh ke sekolah di desa lain. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa produksi ruang di urban fringe masih mengabaikan kebutuhan pendidikan, memperkuat pandangan bahwa ruang dihasilkan berdasarkan logika ekonomis dan birokratis yang mengecualikan aspek sosial penting.

2) Peran Pemerintah dan Pengembang dalam Ketimpangan Tata Ruang

Hasil analisis dokumen dan wawancara dengan pejabat dinas tata ruang serta pengembang properti memperlihatkan dominasi aktor-aktor ini dalam proses produksi ruang. Pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada target pembangunan ekonomi dan investasi, sedangkan pengembang fokus pada pembangunan perumahan dan akses jalan yang cepat terjual.

Pak Jaya, pegawai dinas tata ruang, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan membuat fasilitas sosial seperti sekolah sulit diakomodasi. Ibu Dina, pengembang properti, mengungkapkan bahwa fasilitas tambahan seperti sekolah biasanya diserahkan kepada pemerintah daerah, yang seringkali tidak terealisasi secara memadai. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang dan berkontribusi pada marginalisasi pendidikan di urban fringe.

3) Kesenjangan Akses Pendidikan antara Pusat Kota dan Urban Fringe

Perbedaan nyata antara akses pendidikan di pusat kota dan urban fringe muncul dalam

wawancara dengan warga. Pak Budi menyampaikan bahwa fasilitas pendidikan di pusat kota lengkap dan mudah dijangkau, sementara di urban fringe anak-anak harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi transportasi yang tidak memadai.

Bourdieu menekankan bahwa modal sosial berperan penting dalam mengakses pendidikan. Anak-anak di pusat kota dengan modal sosial dan ekonomi yang lebih besar cenderung memperoleh pendidikan yang berkualitas, sedangkan anak-anak di urban fringe sering menghadapi hambatan struktural. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan bukan sekadar soal jarak fisik, tetapi juga soal distribusi modal sosial yang tidak merata.

4) Ketiadaan Sekolah sebagai Bentuk Kekerasan Simbolik

Absennya fasilitas pendidikan di urban fringe tidak hanya berdampak pada akses fisik, tetapi juga menciptakan kekerasan simbolik yang memperkuat marginalisasi sosial. Warga merasa diabaikan dan diposisikan sebagai warga kelas dua yang haknya tidak sama dengan warga pusat kota.

Bu Nani, seorang ibu warga urban fringe, menyampaikan bahwa harapan mereka untuk mendapatkan sekolah dekat tempat tinggal terus ditunda, sehingga menimbulkan rasa frustrasi dan keterasingan. David Harvey menyatakan bahwa ketidakadilan spasial seperti ini mereproduksi dominasi kelas dan memperkuat hierarki sosial yang eksklusif.

5) Strategi Resistensi dan Adaptasi Warga melalui Infrapolitik

Meskipun menghadapi ketidakadilan, warga urban fringe tidak pasif. James C. Scott menyebutkan bahwa warga yang termarginalkan menggunakan strategi infrapolitik berupa perlawanan tersembunyi dan adaptasi kreatif.

Temuan di lapangan menunjukkan warga menginisiasi kelas belajar informal di rumah atau balai desa untuk mengisi kekosongan pendidikan formal. Pak Arif, relawan pendidikan, menjelaskan bahwa kelas sore yang mereka buka tidak menggantikan sekolah, tetapi setidaknya menjadi solusi sementara yang membantu anak-anak tetap belajar. Praktik ini memperlihatkan modal sosial dan solidaritas warga sebagai modal utama dalam bertahan dan berjuang menghadapi ketimpangan.

6) Modal Sosial sebagai Kunci Akses dan Solidaritas Pendidikan

Jaringan sosial antarwarga memainkan peran vital dalam mengatasi hambatan pendidikan di urban fringe. Modal sosial menurut Bourdieu memungkinkan warga saling membantu, berbagi informasi, dan mengorganisir alternatif pendidikan nonformal.

Bu Ani bercerita bahwa mereka saling bergotong-royong mengajar anak-anak dan berbagi informasi tentang beasiswa atau sekolah swasta. Namun, ketimpangan internal dalam modal sosial juga ditemukan, di mana keluarga dengan jaringan yang kurang kuat mengalami kesulitan mengakses peluang pendidikan. Kondisi ini menandai adanya reproduksi ketidaksetaraan melalui modal sosial itu sendiri.

7) Kebutuhan Perencanaan yang Inklusif dan Responsif

Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan perencanaan tata ruang yang lebih inklusif, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada kebutuhan sosial warga, terutama pendidikan.

Dokumen tata ruang formal yang idealis sering tidak mencerminkan kebutuhan nyata warga di lapangan, sehingga implementasi fasilitas pendidikan terhambat. Penguatan partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan integrasi kebijakan sosial-ekonomi dalam perencanaan kota menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan ini.

Diskusi ini menunjukkan bahwa produksi ruang di urban fringe Kota Makassar merupakan proses yang sarat dengan konflik kepentingan dan ketidakadilan spasial. Pendidikan sebagai hak dasar warga menjadi korban marginalisasi akibat dominasi kepentingan ekonomi dan birokrasi yang kurang responsif terhadap kebutuhan sosial. Strategi resistensi warga yang bersifat infrapolitik memperlihatkan kreativitas dan solidaritas komunitas dalam menghadapi ketidakadilan, meskipun solusi informal ini belum mampu menggantikan peran sekolah formal secara penuh.

Keterbatasan modal sosial warga turut mempengaruhi kemampuan mereka mengakses pendidikan, yang pada gilirannya mereproduksi siklus ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya perencanaan ruang yang inklusif harus melibatkan pengakuan terhadap hak pendidikan, partisipasi aktif warga, serta integrasi kebijakan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

Pemahaman multidimensi tentang produksi ruang dan pendidikan ini memberikan dasar empiris dan teoretis yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah urban fringe, khususnya di Kota Makassar.

4. Hasil dan Diskusi

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa produksi ruang di wilayah urban fringe Kota Makassar berlangsung dalam kerangka relasi kekuasaan yang dominan antara pemerintah daerah, pengembang properti, dan masyarakat lokal yang termarginalkan. Berdasarkan teori Henri Lefebvre tentang *The Production of Space*, ruang bukan hanya produk fisik melainkan arena pertarungan ideologi dan kepentingan yang menentukan siapa yang memiliki akses dan hak di dalamnya. Dalam konteks urban fringe, pendidikan sebagai hak sosial dasar sering kali menjadi korban pengabaian dalam proses produksi ruang, yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dan investasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pertama, absennya fasilitas pendidikan di wilayah urban fringe merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan keadilan spasial (David Harvey), di mana distribusi fasilitas publik tidak merata dan cenderung meminggirkan warga pinggiran. Sekolah yang dijanjikan kepada warga tidak terealisasi, sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh dan menghadapi risiko serta hambatan yang signifikan untuk memperoleh pendidikan. Kedua, struktur kekuasaan yang terjalin antara pemerintah daerah dan pengembang properti lebih mengutamakan target pembangunan ekonomi dibanding kebutuhan sosial, sehingga keberadaan fasilitas pendidikan tidak menjadi prioritas utama dalam perencanaan tata ruang. Ketiga, masyarakat lokal menggunakan strategi infrapolitik (James C. Scott) berupa pembentukan ruang pendidikan informal dan advokasi komunitas sebagai bentuk perlawanan dan adaptasi terhadap marginalisasi sistemik yang mereka alami.

Lebih jauh, penelitian menggarisbawahi peran modal sosial dan kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dalam memperjelas bagaimana ketimpangan akses pendidikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik dan sosial. Modal sosial yang dimiliki warga sangat menentukan kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan dan bertahan dalam kondisi keterbatasan, sementara kekerasan simbolik melalui pengabaian fasilitas pendidikan menegaskan posisi subordinat warga urban fringe dalam struktur sosial. Hal ini turut

memperkuat siklus marginalisasi dan reproduksi ketidaksetaraan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perencanaan tata ruang yang eksklusif dan berorientasi ekonomi tidak mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat urban fringe, khususnya dalam hal akses pendidikan. Pendekatan perencanaan yang inklusif dan partisipatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat terpenuhi secara adil dan merata. Integrasi kebijakan sosial-ekonomi dan peningkatan partisipasi warga dalam proses perencanaan menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan dan membangun ruang perkotaan yang berkeadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara produksi ruang dan pendidikan dalam konteks urbanisasi perkotaan, serta menegaskan urgensi memperjuangkan keadilan spasial melalui intervensi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan pengembang perlu mengintegrasikan fasilitas pendidikan secara nyata dalam setiap proyek pembangunan, dan melibatkan komunitas lokal sebagai mitra strategis dalam perencanaan. Selain itu, penguatan modal sosial masyarakat dan pemberdayaan komunitas pendidikan informal harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah urban fringe.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa produksi ruang di wilayah urban fringe Kota Makassar berlangsung dalam kerangka relasi kekuasaan yang dominan antara pemerintah daerah, pengembang properti, dan masyarakat lokal yang termarjinalkan. Berdasarkan teori Henri Lefebvre tentang *The Production of Space*, ruang bukan hanya produk fisik melainkan arena pertarungan ideologi dan kepentingan yang menentukan siapa yang memiliki akses dan hak di dalamnya. Dalam konteks urban fringe, pendidikan sebagai hak sosial dasar sering kali menjadi korban pengabaian dalam proses produksi ruang, yang lebih mengedepankan aspek ekonomi dan investasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pertama, absennya fasilitas pendidikan di wilayah urban fringe merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan keadilan spasial (David Harvey), di mana distribusi fasilitas publik tidak merata dan cenderung meminggirkan warga pinggiran. Sekolah yang dijanjikan kepada warga tidak terealisasi,

sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh dan menghadapi risiko serta hambatan yang signifikan untuk memperoleh pendidikan. Kedua, struktur kekuasaan yang terjalin antara pemerintah daerah dan pengembang properti lebih mengutamakan target pembangunan ekonomi dibanding kebutuhan sosial, sehingga keberadaan fasilitas pendidikan tidak menjadi prioritas utama dalam perencanaan tata ruang. Ketiga, masyarakat lokal menggunakan strategi infrapolitik (James C. Scott) berupa pembentukan ruang pendidikan informal dan advokasi komunitas sebagai bentuk perlawanan dan adaptasi terhadap marginalisasi sistemik yang mereka alami.

Lebih jauh, penelitian menggarisbawahi peran modal sosial dan kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dalam memperjelas bagaimana ketimpangan akses pendidikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik dan sosial. Modal sosial yang dimiliki warga sangat menentukan kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan dan bertahan dalam kondisi keterbatasan, sementara kekerasan simbolik melalui pengabaian fasilitas pendidikan menegaskan posisi subordinat warga urban fringe dalam struktur sosial. Hal ini turut memperkuat siklus marginalisasi dan reproduksi ketidaksetaraan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perencanaan tata ruang yang eksklusif dan berorientasi ekonomi tidak mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat urban fringe, khususnya dalam hal akses pendidikan. Pendekatan perencanaan yang inklusif dan partisipatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat terpenuhi secara adil dan merata. Integrasi kebijakan sosial-ekonomi dan peningkatan partisipasi warga dalam proses perencanaan menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan dan membangun ruang perkotaan yang berkeadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antara produksi ruang dan pendidikan dalam konteks urbanisasi perkotaan, serta menegaskan urgensi memperjuangkan keadilan spasial melalui intervensi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan pengembang perlu mengintegrasikan fasilitas pendidikan secara nyata dalam setiap proyek pembangunan, dan melibatkan komunitas lokal sebagai mitra strategis dalam perencanaan. Selain itu, penguatan modal sosial masyarakat dan pemberdayaan komunitas pendidikan informal harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang

untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah urban fringe.

1) Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi artikel ini. Semua data dan temuan disajikan secara jujur tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil penelitian.

2) Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Berau atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan pihak terkait yang telah memberikan waktu dan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan tata ruang di wilayah urban fringe.

6. Daftar Pustaka

- Akil, A., Yudono, A., Wahyuni, S., Ramadhani, R., & Kamaruddin, I. (2020). Relationship between regional development level and accessibility index in Makassar coastal area. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 875(1), 012013. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/875/1/012013>
- Al-Sabbagh, T. A. (2022). GIS location-allocation models in improving accessibility to primary schools in Mansura city-Egypt. *GeoJournal*, 87(2), 1009–1026. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10290-5>
- Andini, M. D., Lestari, F., Medtry, M., & Karenina, A. (2023). The peri-urban gentrification process in Cisauk Subdistrict, Tangerang Regency, Indonesia. *Forum Geografi*, 37(1). <https://doi.org/10.23917/forgeo.v37i1.21806>
- Ashtiani, M., & Feliciano, C. (2018). Access and mobilization: How social capital relates to low-income youth's postsecondary educational (PSE) attainment. *Youth & Society*, 50(4), 439–461. <https://doi.org/10.1177/0044118X15607163>
- Baldrige, B. J., Beck, N., Medina, J. C., & Reeves, M. A. (2017). Toward a new understanding of community-based education: The role of community-based educational spaces in disrupting inequality for minoritized youth. *Review of Research in Education*, 41(1), 381–402. <https://doi.org/10.3102/0091732X16688622>
- Banu, N., & Fazal, S. (2016). Urban fringe: The concept (pp. 1–24). https://doi.org/10.1007/978-3-319-39660-6_1
- Barrett, B. D., & Martina, C. A. (2012). Towards a non-deterministic reading of Pierre Bourdieu: Habitus and educational change in urban schools. *Policy Futures in Education*, 10(3), 249–262. <https://doi.org/10.2304/pfie.2012.10.3.249>
- Batuman, B. (2019). Space in representation. In *The Routledge Handbook of Henri Lefebvre, the City and Urban Society* (pp. 183–192). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315266589-19>
- Burhanuddin, B., Syufri, S., Asriani, A., Hartawan, H., & Saputra, A. N. (2024). Exploring the role of regional capacity in human resource development in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1412098>
- Cozza, C. (2023). La riqualificazione dei margini urbani per la vivibilità locale e la riconnessione delle reti. *TERRITORIO*, 103, 53–60. <https://doi.org/10.3280/TR2022-103007OA>
- Croizet, J.-C., Goudeau, S., Marot, M., & Millet, M. (2017). How do educational contexts contribute to the social class achievement gap: Documenting symbolic violence from a social psychological point of view. *Current Opinion in Psychology*, 18, 105–110. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.08.025>
- Danley, S., & Rubin, J. S. (2020). What enables communities to resist neoliberal education reforms? Lessons from Newark and Camden, New Jersey. *Journal of Urban Affairs*, 42(4), 663–684. <https://doi.org/10.1080/07352166.2019.1578174>
- Deggs, D. M., & Miller, M. T. (2013). Community college and community leader expectations of the “village.” *Community College Journal of Research and Practice*, 37(6), 424–432. <https://doi.org/10.1080/10668926.2011.592416>
- Dolan, L. A. (2020). Irregular schools and schooling (pp. 297–312). https://doi.org/10.1007/978-981-10-2362-0_19
- Dräger, J., Klein, M., & Sosu, E. (2024). The long-term consequences of early school absences for educational attainment and labour market outcomes. *British Educational Research*

- Journal*, 50(4), 1636–1654.
<https://doi.org/10.1002/berj.3992>
- Ergin, M., Rankin, B., & Gökşen, F. (2019). Education and symbolic violence in contemporary Turkey. *British Journal of Sociology of Education*, 40(1), 128–142.
<https://doi.org/10.1080/01425692.2018.1500274>
- Fuller, C. (2014). Social capital and the role of trust in aspirations for higher education. *Educational Review*, 66(2), 131–147.
<https://doi.org/10.1080/00131911.2013.768956>
- Gallent, N., Shoard, M., Andersson, J., Oades, R., & Tudor, C. (2004). Inspiring England's urban fringes: Multi-functionality and planning. *Local Environment*, 9(3), 217–233.
<https://doi.org/10.1080/1354983042000219342>
- Huang, A., Xu, Y., Zhang, Y., Lu, L., Liu, C., Sun, P., & Liu, Q. (2022). A spatial equilibrium evaluation of primary education services based on living circle models: A case study within the city of Zhangjiakou, Hebei Province, China. *Land*, 11(11), 1994.
<https://doi.org/10.3390/land11111994>
- Kalfas, D., Kalogiannidis, S., Papadopoulou, C.-I., & Chatzitheodoridis, F. (2024). The value of periurban forests and their multifunctional role: A scoping review of the context of and relevant recurring problems (pp. 329–345).
<https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15832-2.00014-9>
- Kilpatrick, S., Johns, S., & Mulford, B. (2010). Social capital, educational institutions and leadership. In *International Encyclopedia of Education* (pp. 113–119). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00426-7>
- Koch, D. (2018). On architectural space and modes of subjectivity: Producing the material conditions for creative-productive activity. *Urban Planning*, 3(3), 70–82.
<https://doi.org/10.17645/up.v3i3.1379>
- Kuru Cetin, S., & Taskin, P. (2016). Parent involvement in education in terms of their socio-economic status. *Eurasian Journal of Educational Research*, 16(66), 1–30.
<https://doi.org/10.14689/ejer.2016.66.6>
- Libório, M. P., Rabiei-Dastjerdi, H., Brunson, C., Pinto, M. de R., Fusco, E., & Vidoli, F. (2024). Ordered weighted averaging for the evaluation of urban inequality in Sao Sebastião Do Paraíso. *Cities*, 150, 104993.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104993>
- MacDonald, K., Keddie, A., Eacott, S., Wilkinson, J., Blackmore, J., Niesche, R., & Gobby, B. (2024). The spatiality of economic maldistribution in public-school funding in Australia: Still a poisonous debate. *Journal of Educational Administration and History*, 56(2), 180–201.
<https://doi.org/10.1080/00220620.2023.2174952>
- Marshall, B. D., Astone, N., Blum, R. W., Jejeebhoy, S., Delany-Moretlwe, S., Brahmhatt, H., Olumide, A., & Wang, Z. (2014). Social capital and vulnerable urban youth in five global cities. *Journal of Adolescent Health*, 55(6), S21–S30.
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.08.021>
- Mateo-Doll, M., & Aghezaf, E. (2025). Optimizing extracurricular activities assignment and related logistical deployment cost between collaborating schools. *International Transactions in Operational Research*, 32(2), 745–768.
<https://doi.org/10.1111/itor.13458>
- Miller, R. T., Murnane, R. J., & Willett, J. B. (2008). Do worker absences affect productivity? The case of teachers. *International Labour Review*, 147(1), 71–89.
<https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2008.00024.x>
- Morgan, J. J. (2022). Educational programming for students with disabilities in urban schools. *Intervention in School and Clinic*, 58(2), 71–75.
<https://doi.org/10.1177/10534512211051066>
- Mulya, S. P., Munif, M., Pravitasari, A. E., Rustiadi, E., & Widiatmaka. (2022). Land use and spatial planning in the border area of Bogor Regency and Bogor City, West Java Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 950(1), 012099.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012099>
- Newman, A., Deschenes, S., & Hopkins, K. (2012). From agitating in the streets to implementing in the suites. *Educational Policy*, 26(5), 730–758.
<https://doi.org/10.1177/0895904811417586>
- Ni, J., & Gao, Y. (2025). Opportunities for higher education for children, financial literacy and household capital. *Finance Research Letters*, 78, 107236.
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107236>
- Niklas, F., Cöhrssen, C., & Tayler, C. (2016). Parents supporting learning: A non-intensive

- intervention supporting literacy and numeracy in the home learning environment. *International Journal of Early Years Education*, 24(2), 121–142. <https://doi.org/10.1080/09669760.2016.1155147>
- Norton, R. K. (2005). Local commitment to state-mandated planning in coastal North Carolina. *Journal of Planning Education and Research*, 25(2), 149–171. <https://doi.org/10.1177/0739456X05278984>
- Prahmana, R. C. I., Hartanto, D., Kusumaningtyas, D. A., Ali, R. M., & Muchlas. (2021). Community radio-based blended learning model: A promising learning model in remote area during pandemic era. *Heliyon*, 7(7), e07511. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07511>
- Ramond, Q., & Oberti, M. (2022). Housing tenure and educational opportunity in the Paris metropolitan area. *Housing Studies*, 37(7), 1079–1099. <https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1845304>
- Rutanen, N. (2017). Spatial perspective on everyday transitions within a toddler group care setting (pp. 49–62). https://doi.org/10.1007/978-981-10-3197-7_4
- Salih, S. A., Alzamil, W., Ajlan, A., Azmi, A., & Ismail, S. (2024). Typology of informal learning spaces (ILS) in sustainable academic education: A systematic literature review in architecture and urban planning. *Sustainability*, 16(13), 5623. <https://doi.org/10.3390/su16135623>
- Sari, L. K., Thomas, V., De Backer, F., & Lombaerts, K. (2024). Pre-service teachers' teaching challenges and the transformative learning opportunities during teaching practice in Indonesian remote areas. *European Journal of Teacher Education*, 47(3), 581–598. <https://doi.org/10.1080/02619768.2022.2071257>
- Shakeri, M., & Arjmand, A. (2019). Improving the quality of life in a residential complex by identifying the practical criteria of educational public spaces. *Innovaciencia Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales*, 7(2). <https://doi.org/10.15649/2346075X.765>
- Surya, B. (2015). The dynamics of spatial structure and spatial pattern changes at the fringe area of Makassar City. *Indonesian Journal of Geography*, 47(1), 11. <https://doi.org/10.22146/ijg.6926>
- Wu, P., & Liu, M. (2022). A framework for the spatial inequality in urban public facility for urban planning, design and management. *Land*, 11(9), 1429. <https://doi.org/10.3390/land11091429>
- Yau, O. K. T., Chin, D. C. W., & Hsu, C. H. C. (2023). Understanding and planning for informal learning space development: A case study in Hong Kong. *Cogent Education*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2180863>
- Zanudin, K., Ngah, I., & Misnan, S. H. (2019). Evaluating community participation in planning decision-making in Iskandar Malaysia: Thematic analysis of public planner's perception. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 385(1), 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/385/1/012007>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).